

**PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENERIMAAN PPN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL
PAJAK JAWA TIMUR I TAHUN 2016 - 2022**

SKRIPSI



Oleh :

**KHARISMA RINDY MUSTIKA
2012321007/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

**PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENERIMAAN PPN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
JAWA TIMUR I TAHUN 2016 - 2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**KHARISMA RINDY MUSTIKA
2012321007/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

SKRIPSI

PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PPN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAWA TIMUR I TAHUN 2016 - 2022

Yang Diajukan

KHARISMA RINDY MUSTIKA
2012321007/AK

Telah disetujui untuk ujian skripsi oleh

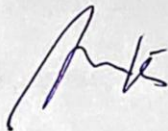
Pembimbing I



Nur Lailiyatul Inayah, SE. M. Ak
NIDN. 0713097401

Tanggal : 10/3/24

Pembimbing II

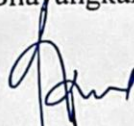


Dra. Kusni Hidayati, M. Si Ak, CA
NIDN. 0711115801

Tanggal : 12/3/24

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec.,MM.
NIDN. 070310640

SKRIPSI

**PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENERIMAAN PPN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL
PAJAK JAWA TIMUR I TAHUN 2016 - 2022**

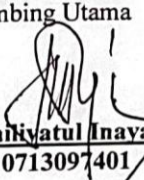
Yang Diajukan

KHARISMA RINDY MUSTIKA

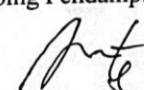
2012321007/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

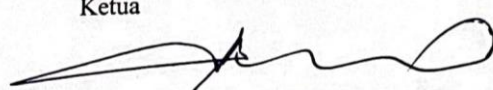
Pembimbing
Pembimbing Utama


Nur Lailiyatul Inayah, SE. M. Ak
NIDN. 0713097401

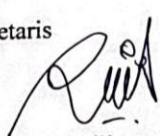
Pembimbing Pendamping


Dra. Kusni Hidayati, M.Si Ak, CA
NIDN. 0711115801

Tim Penguji
Ketua


Dr. Mohammad Balafif, M. Ec
NIDN. 0015055902

Sekretaris


Ria Dini Apriliasari, S.E., MSA
NIDN. 0719049102

Anggota


Nur Lailiyatul Inayah, SE. M. Ak
NIDN. 0713097401

Mengetahui
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosvafah, Dra. Ec., MM
NIDN. 070310640

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kharisma Rindy Mustika

NIM : 2012321007

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun dengan judul :

“Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan PPN Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I Tahun 2016 - 2022”

Adalah benar - benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi / tugas akhir orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku yaitu pencabutan predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 1 Februari 2024

Yang Menyatakan


METERAI
TEMPEL
89657AKX831305055
(Kharisma Rindy)

NIM 2012321007

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Adapun judul dalam penelitian ini adalah **“ Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan PPN di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I Tahun 2016 - 2022”**

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis mengakui bahwa membutuhkan usaha yang keras dalam pengerjaan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang memberikan dukungan serta bantuan. Saya sampaikan Terima Kasih Kepada :

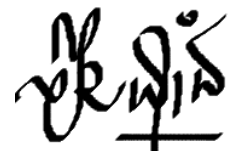
1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, SH.,M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. EC.,MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Drs. Ec. Nurul Qomari, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Dr.Arief Rahman, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Ibu Nur Lailiyatul Inayah SE. M. Ak selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan sabar serta memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Dra. Kusni Hidayati, M. Si Ak, CA selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan

penulis dengan sabar serta membrikan motivasi sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi ini

7. Bapak Suliyanto dan Ibu Kanti Asih selaku orang tua saya yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat tiada henti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Ade Firmansyah yang selalu menemani penulis serta memberikan support kepada penulis baik berupa materi maupun non materi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman dekat saya Alfi Roikhana, Eka Setya, Lia Afizah, Diniatul Aulia, dan seluruh teman teman saya baik dari sesama prodi Akuntansi 20 maupun berbeda fakultas di Universitas Bhayangkara Surabaya, terimakasih telah memberikan cerita menarik selama saya berkuliah di Universitas Bhayangkara.
10. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah mampu bertahan sejauh ini, walaupun pada hakikatnya manusia itu berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Tapi semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ketenangan pada jiwa kita dan selalu mengarahkan kita pada kebaikan.

Surabaya 1 Februari 2024

Penulis



Kharisma Rindy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSIi

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

SURAT PERNYATAAN.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABEL.....xi

DAFTAR GAMBAR.....xii

ABSTRAK.....xiii

ABSTRACT.....xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 8

1.5 Sistematika Penulisan..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 10

2.1 Penelitian Terdahulu 10

2.2 Landasan Teori..... 13

2.2.1 Definisi Pajak.....13

2.2.2 Jenis Pajak..... 13

2.2.3 Sistem Pemugutan Pajak 15

2.2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 16

2.2.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
2.2.4.2 Objek Pajak	17
2.2.4.3 Subjek Pajak.....	20
2.2.4.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20
2.2.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.2.5.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi	21
2.2.5.2 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi.....	22
2.2.6 Inflasi	23
2.2.6.1 Indikator Inflasi.....	25
2.2.7 Hubungan Antar Variabel	26
2.2.7.1 Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan PPN.....	26
2.2.7.2 Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan PPN.....	27
2.2.7.3 Hubungan Inflasi yang berpengaruh secara dominan terhadap Penerimaan PPN.....	27
2.3 kerangka konseptual.....	28
2.4 Hipotesis.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Kerangka proses berpikir	30
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	32
3.2.1 Definisi Operasional Variabel.....	32
3.2.1.1 Variabel Independen	32
3.2.1.2 Variabel Dependen.....	33
3.2.2 Pengukuran Variabel.....	34

3.3 Penentuan Populasi, Besar sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	34
3.3.1 Populasi	34
3.3.2 Sampel.....	35
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel.....	35
3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5.1 Jenis Data	36
3.5.2 Metode Pengumpulan Data	37
3.5.3 Statistik Deskriptif.....	37
3.5.4 Uji Asumsi Klasik	37
3.6 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis	40
3.6.1 Teknik analisis	40
3.6.1.1 Analisis Regresi Berganda.....	40
3.6.2 Uji hipotesis	41
3.6.2.1 Uji hipotesis Secara Simultan (Uji F)	41
3.6.2.2 Uji Hipotesis Parsial (Uji t).....	43
3.6.3 Uji Dominan (Koefisien Beta)	45
3.6.4 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	47
4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Wilayah DJP Jatim I.....	47
4.1.2 Visi Misi Kantor Wilayah DJP Jatim I.....	49
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jatim I.....	49
4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian.....	51

4.2.1 Data Inflasi.....	52
4.2.2 Data Pertumbuhan Ekonomi.....	52
4.2.3 Data Penerimaan PPN.....	53
4.3 Analisis Hasil Penelitian Dan Pengujian Hipotesis.....	54
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	54
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	55
4.3.2.1 Uji Normalitas.....	55
4.3.2.2 Uji Multikolinearitas.....	57
4.3.2.3 Uji Heterokedastisitas.....	58
4.3.2.4 Uji Autokorelasi.....	59
4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
4.3.4 Uji Hipotesis.....	62
4.3.4.1 Uji t.....	62
4.3.4.2 Uji F.....	64
4.3.4.3 Uji Koefisien Determinasi R ²	64
4.3.4.4 Uji Dominan.....	66
4.4 Pembahasan.....	67
4.4.1 Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan terhadap penerimaan PPN.....	68
4.4.2 Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara parsial terhadap penerimaan PPN.....	69
4.4.3 Pengaruh Inflasi secara dominan terhadap penerimaan PPN.....	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Simpulan.....	72

5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Data Inflasi	52
Tabel 4.2 Data Pertumbuhan Ekonomi.....	53
Tabel 4.3 Data Target dan Realisasi Penerimaan PPN Kanwil DJP Jatim I.....	53
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov.....	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas metode Spearman Rho.....	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi.....	60
Tabel 4.9 Hasil Analisis Linear Berganda.....	61
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	63
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi R ²	65
Tabel 4.13 Hasil Uji Dominan.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PPN.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	28
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir.....	30
Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji F.....	42
Gambar 3.3 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t sisi kanan.....	44
Gambar 3.4 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t sisi kiri.....	44
Gambar 4.1 Histogram Hasil Uji Normalitas	56
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Normal Probability Plot	56
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	58

**PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENERIMAAN PPN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL
PAJAK JAWA TIMUR 1 TAHUN 2016 – 2022**

KHARISMA RINDY MUSTIKA

Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi
Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel penelitian terhadap penerimaan PPN. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan PPN. Populasi dalam penelitian ini adalah Penerimaan PPN di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I tahun 2016 – 2022. Pemilihan sampel yang dilakukan dengan metode *non probability sampling* dengan teknik *sampling* jenuh. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPN. Dalam penelitian ini juga dapat diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang paling dominan terhadap penerimaan PPN.

Kata Kunci : Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan PPN

**PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENERIMAAN PPN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL
PAJAK JAWA TIMUR 1 TAHUN 2016 – 2022**

KHARISMA RINDY MUSTIKA

Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi
Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of research variables on Value Add Tax revenues. The independent variables used in this research are the Inflation and Economic Growth variables while the dependent variable in this research is Value Add Tax revenue. The population in this research is Value Add Tax revenue at the Regional Office of the Directorate General of Taxes, East Java I, 2016 - 2022. Sample selection was carried out using a non-probability sampling method with a saturated sampling technique. The data used is secondary data. The analysis techniques used are classical assumption test, multiple regression analysis, hypothesis testing. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the variables Inflation and Economic Growth simultaneously influence Value Add Tax revenues. In this research it can also be seen that the economic growth variable is the most dominant variable in Value Add Tax revenues.

Keywords : *Inflation, Economic Growth, Value Add Tax revenues.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sektor yang memberikan aliran dana terbesar untuk negara. Pajak menjadi salah satu harapan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendanai pembangunan. Pajak secara resmi merupakan sumbangan yang patut dipenuhi untuk negara, yang dibayar oleh orang pribadi atau badan terutang yang didasari oleh Undang-Undang, dengan tidak memperoleh keuntungan secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan daerah bagi sebenar-benarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berdasarkan Undang Undang republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang peraturan pajak. Dikutip dari website resmi kementrian keuangan menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai adalah penyumbang terbesar kedua setelah pajak penghasilan. “Menurut Priantara (2018) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi di wilayah pabean, dapat diartikan beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)”. Pada bulan april 2022 Pemerintah resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% dari yang sebelumnya 10%.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jatim I) merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Instansi ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

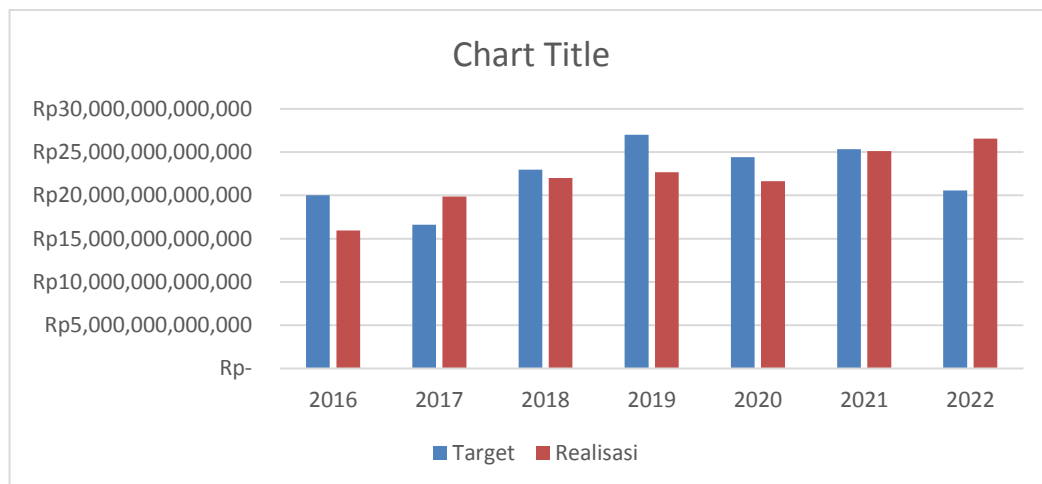
Penerimaan pajak menjadi andalan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga harus benar-benar dikawal dalam mencapai target yang telah ditentukan. Dengan rasa optimisme, seluruh pegawai Kanwil DJP Jatim I bersama-sama berjuang menjalankan amanah yang telah diberikan untuk mengamankan target penerimaan pajak tahun 2022.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/ PMK.01/2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/ PMK.01/2020, pada dasarnya tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta penjabaran kebijakan dari Kantor Pusat DJP. Pada Mei 2021, DJP melakukan reorganisasi pada instansi vertikal dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan dari sisi pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang lebih efisien, efektif, berintegritas, berkeadilan, dan bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang andal.

Target penerimaan tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20,56 triliun rupiah. Upaya pencapaian target penerimaan pajak tersebut berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Kemudian ditempuh melalui upaya peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), serta membangun kesadaran Wajib Pajak untuk mewujudkan penerimaan pajak yang berkesinambungan (*sustainable revenue*).

Wilayah Surabaya yang merupakan Ibukota Jawa Timur diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melihat pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya yang berkembang pesat, selain itu

banyaknya akses perdagangan ekspor impor melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Akan tetapi penerimaan PPN masih tergolong rendah, terlihat pada perbandingan realisasi dan target penerimaan PPN di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I tahun 2016 – 2022 sebagai berikut :



Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, (data diolah penulis) 2023

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I tahun 2016 – 2022

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PPN pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 26,5 triliun, akan tetapi pada tahun tahun sebelumnya dampak pandemi covid-19 mengakibatkan menurunnya realisasi penerimaan PPN pada tahun 2019 sebesar 22,6 triliun dan tahun 2020 sebesar 21,6 triliun bahkan tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PPN di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I belum maksimal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba meneliti mengenai pengaruh variabel Inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN. Penelitian

Nadia Amelia (2023) menunjukkan hasil Inflasi, tidak berdampak pada penerimaan PPN, sedangkan PDB memiliki dampak positif yang cukup besar. Yeni sapridawati, Novita Indrawati, Azhari Sofyan, Zirman (2021) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Tongan Sinambela, Suci Rahmawati (2019) menunjukkan hasil bahwa inflasi, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada penerimaan PPN, tetapi ada beberapa penelitian lain yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan perbedaan hasil tersebut, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian kembali terhadap kedua variabel ekonomi makro yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua variabel ini digunakan karena merupakan faktor penting dalam perekonomian makro.

Kegiatan konsumsi berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi, semakin meningkatnya kegiatan konsumsi berpengaruh kepada jumlah PPN. Jika barang dan jasa mengalami kenaikan atau mengalami inflasi maka akan meningkatkan harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan PPN. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari indikator Produk domestik Bruto, laju pertumbuhan PDB yang tinggi mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDB menandakan meningkatnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan naiknya penerimaan pajak yaitu PPN, karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Akan tetapi realisasi penerimaan PPN di Kanwil DJP Jawa

Timur I belum maksimal

Berdasarkan fenomena tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan ekonomi berkaitan erat dengan penerimaan PPN . Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan utama untuk menjaga keberlangsungan negara. Adanya faktor internal dan eksternal untuk menjaga kestabilan perekonomian agar penerimaan PPN tetap tercapai sesuai target.

Pertumbuhan ekonomi di Surabaya mengalami kenaikan dalam waktu dua tahun terakhir. Eri Cahyadi selaku walikota Surabaya memastikan pertumbuhan ekonomi Surabaya terus meningkat. Pasalnya, hingga bulan November tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai angka 7,17 %. Padahal, pada tahun 2020 atau di masa pandemi Covid-19, ekonomi Surabaya menurun sekitar 4,85 %, kemudian di tahun 2021 meningkat jadi 4,29 % dan di tahun ini meningkat lagi menjadi 7,17 %.

“Menurut Nasrullhoh (2019) pertumbuhan ekonomi dan penerimaan PPN mempunyai hubungan yang positif. Artinya memiliki hubungan yang tinggi dengan penerimaan PPN. Salah satu indikator yang memiliki peranan penting untuk mengetahui keadaan pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB).” PDB merupakan perhitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasional, pada dasarnya Produk Domestik Bruto mengukur seluruh volume produks dari suatu wilayah (negara) secara geografis. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menurun dalam kurun waktu tertentu yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Jika terjadi kenaikan inflasi, maka penerimaan

PPN akan ikut naik, karena meningkatnya harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP). Jika terjadi penurunan inflasi, maka PPN akan turun karena menurunnya harga jual yang menjadi DPP PPN.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 penerimaan PPN dan PPnBM ditargetkan senilai Rp552,3 triliun atau meningkat 10,1% dibandingkan dengan outlook tahun ini Rp501,8 triliun. Rencana target tahun depan tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan capaian pada 2019 senilai Rp531,6 triliun. Meningkatnya target PPN dan PPnBM dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan PPN”. Alasan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan relevansi dengan isu ekonomi *actual*. Inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan PPN adalah isu-isu ekonomi yang selalu menjadi sorotan publik, ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan dalam konteks kebijakan ekonomi

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I ?
2. Apakah inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I?
3. Di antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi manakah yang berpengaruh secara dominan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan pengaruh inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I
2. Untuk membuktikan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I
3. Untuk membuktikan diantara Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi manakah yang berpengaruh secara dominan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga dapat bermanfaat dalam menyumbangkan ide ataupun teori untuk penelitian selanjutnya yang bersifat positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu akuntansi khususnya perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan masukan untuk hal-hal yang menyangkut tentang Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Bagi Akademisi, diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat sebagai bahan referensi antara teori yang didapat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta dapat menyumbangkan ide ataupun pemikiran untuk pihak lain atau pembaca yang memerlukan untuk dikembangkan lebih luas dan mendalam.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan maka penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bagian pertama dimana dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan Pustaka, penelitian , landasan teori, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang kerangka proses berfikir, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik penentuan populasi, besar sampel dan teknik pengambilan sampel, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian data, teknik analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, data dan deskripsi hasil penelitian analisis dan pengujian hipotesis, pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Didalam bab ini akan dikemukakan simpulan dan saran yang akan diperoleh dari keseluruhan pembahasan yang akan dilakukan pada bab-bab sebelumnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

“Menurut Randi (2018) penelitian terdahulu dapat dijadikan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.” Dari penelitian terdahulu, peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam melengkapi bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini.

1. Nadia Amelia, Tri Kunawangsih (2023)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto, Terhadap Penerimaan PPN di Indonesia Periode 2005 - 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2005 – 2020 inflasi tidak berdampak pada penerimaan PPN di Indonesia.

2. Dede Krisnafani (2022)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. (Studi pada kantor wilayah DJP Jawa Barat III). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

3. Yeni sapridawati, Novita Indrawati, Azhari Sofyan, Zirman (2021)

Penelitian ini berjudul pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai studi kasus (KPP Pratama Pekanbaru).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Semakin tinggi inflasi dan nilai tukar rupiah maka penerimaan juga akan semakin tinggi.

4. Rizky Maulianika (2022)

Penelitian ini berjudul pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Tenggarong Tahun 2015 – 2021) . Penelitian ini dilakukan di KPP Tenggarong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN.

5. Tongam Sinambela, Suci Rahmawati (2019)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah PKP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berikut ini adalah data dari penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.	PENELITI & JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Nadia Amelia, Tri Kunawangsih (2023) Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto, terhadap penerimaan PPN di Indonesia Periode 2005 - 2020	a. Menggunakan variabel independen inflasi b. Menggunakan metode kuantitatif	a. Objek Penelitian b. Tahun Penelitian	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2005 – 2020 Inflasi tidak berdampak pada penarikan PPN di Indonesia
2.	Dede Krisnafani (2022) Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan PPN	a. Menggunakan variabel independen inflasi dan pertumbuhan ekonomi b. Menggunakan metode kuantitatif	a. Objek Penelitian b. Uji Dominan	Hasil pengujian secara simultan dapat diketahui bahwa Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN
3.	Yeni sapridawati, Novita Indrawati, Azhari Sofyan, Zirman (2021) Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN studi kasus KPP Pratama Pekanbaru	a. Menggunakan variabel independen inflasi b. Menggunakan metode kuantitatif	a. Objek Penelitian b. Menggunakan variabel independen pertumbuhan ekonomi	Inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN
4.	Rizky Maulianika (2022) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Tenggarong Tahun 2015 – 2021)	a. Menggunakan variabel independen inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi b. Menggunakan metode kuantitatif	a. Objek Penelitian b. Uji Dominan	Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN
5.	Tongam Sinabela, Suci Rahmawati (2019) Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pusat DJP Jakarta	a. Menggunakan variabel independen inflasi b. Menggunakan metode kuantitatif	a. Objek Penelitian b. Menggunakan variabel independen pertumbuhan ekonomi	Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah PKP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Pajak

Definisi Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah pungutan yang dilakukan sebuah negara (daerah maupun pusat) yang digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah tersebut berdasarkan peraturan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur dan tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Juli Ratnawati (2016)”. Definisi pajak “menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) pajak adalah iuran yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (menurut undang- undang) dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.”

Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Jenis Pajak

“Menurut Siti Resmi (2017) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga”, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan

tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak- pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung dibebankan jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadinya penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifatnya

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak Subjektif

Pajak yang didasarkan dengan melihat situasi individu wajib pajak atau perhitungan pajak yang memperhatikan subjeknya

b. Pajak Objektif

Pajak yang dibebankan sesuai dengan sasarannya baik bersifat benda, kondisi, atau tindakan yang memicu munculnya keharusan melunasi pajak yang terhutang, tanpa melihat situasi individu wajib pajak

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dikenakan tarif oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kebutuhan pokok negara secara umum

b. Pajak Daerah

Pajak yang dikenakan tarif oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten) dan dipergunakan untuk pembiayaan umum daerah masing – masing.

2.2.3 Sistem Pemugutan Pajak

Menurut Lazarus, (2020) menyatakan bahwa system pemungutan pajak memiliki tiga cara, yaitu:

1. *Self Assessment System*

Sistem Penilaian Diri merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dimana sistem ini membebaskan ketentuan besarnya pajak yang harus dibayar secara mandiri oleh pihak yang bersangkutan

Ciri – Ciri *Self Assesment System*

- Penentuan atas besarnya pajak terutang dilakukan oleh pihak wajib pajak itu sendiri
- Wajib pajak hendaknya mempunyai peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melapor pajak.
- Surat Ketetapan Pajak tidak perlu lagi dikeluarkan oleh pemerintah. Kecuali apabila wajib pajak telat lapor, telat membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya wajib dibayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official Assessment System*

Sistem Penilaian Resmi merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada petugas pajak dalam kedudukannya sebagai pemungut pajak.

Ciri-Ciri *Official Assessment System*

- Sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak yang dipilih dalam pengelolaan pajak.
- Kewajiban perpajakan timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dalam dokumen ketetapan pajak
- Besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak ditentukan oleh pemerintah

3. *Withholding System*

Pihak ketiga memiliki wewenang dimiliki oleh pihak ke tiga dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar merupakan ciri dari sistem pajak ini

2.2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

“Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di area Pabean atau atas impor BKP. (Salam 2017)”

“Menurut Priantara (2018) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak

tidak langsung atas konsumsi di area pabean, dalam artian beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) “

“Puspitha & Supadmi, (2018) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang didasari oleh harga tambahan pada barang dan jasa saat proses transaksi” Berdasarkan definisi definisi tersebut bisa dilihat dasar pengenaan PPN adalah pengenaan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat atas konsumsi.

2.2.4.2 Objek Pajak

Menurut Salam, (2017) Pajak Pertambahan Nilai didasari pada :

1) Pengenaan Barang Kena Pajak (BKP) didalam area Pabean yang dibuat oleh pengusaha. Ketentuan sebagai berikut :

- Barang berwujud yang diberikan jenis BKP
- BKP tidak berwujud yang diberikan untuk jenis barang tidak berwujud
- Pemberian dilaksanakan dalam wilayah pabean.
- Pemberian diberikan dalam hal penyerahan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

2) Impor Barang Kena Pajak

3) Jasa KenaPajak (JKP) pada wilayah yang dapat dilaksanakan oleh pengusaha.

Ketentuannya ialah:

- Jasa yang diberikan adalah Jasa Kena Pajak
- Pemberian dilaksanakan dalam area pabean
- Pemberian dilaksanakan pada situasi aktivitas usaha atau pekerjaannya

- 4) Penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar wilayah pebean
- 5) Penggunaan Jasa Kena Pajak yang berasal diluar wilayah pabean
- 6) Pengeriman BKP keluar negeri yang memiliki wujud oleh PKP

A. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut (Lazarus 2020) Barang Kena Pajak adalah barang yang menurut Sifat Maupun hukumnya dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dapat dikategorikan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN

B. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP)

Aturan umunya adalah semua barang dapat dikenakan PPN Kecuali ditentukan lain oleh undang undang. Dalam pasal 4A ayat (2) Perubahan Ketiga UU 16 PPN 1984, daftar barang yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan yang dapat dijangkau tepat dari sumbernya seperti minyak mentah (crude oil), panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, felspar, (feldspar), garam batu (halite), garfit, granit/andesit.
- b. barang kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh rakyat seperti padi, jagung, sagu, kedelai, garam, telur, susu buah-buahan, sayur-sayuran,
- c. makanan serta minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dimakan langsung di tempat maupun tidak, meliputi konsumsi yang dibuat oleh pembisnis makanan
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga (saham,obligasi)

C. Jasa Kena Pajak

“Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan jasa yang didasarkan suatu perbuatan hukum yang mempengaruhi barang atau hak pakai termasuk jasa yang kegiatannya menghasilkan barang sesuai dengan pesanan atau permintaan memakai bahan sesuai dengan petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan per Undang-Undang PPN. (Lazarus 2020)”

D. Jasa Tidak Kena Pajak

Telah ditetapkan beberapa kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai dengan Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan PPnBM yaitu :

- (1) jasa Kesehatan
- (2) jasa keuangan
- (3) jasa asuransi,
- (4) jasa dibidang pelayanan sosial
- (5) jasa kirim surat dengan perangko
- (6) jasa dibidang ke agamaan,
- (7) jasa dibidang Pendidikan
- (8) jasa penyiaran tidak bersifat iklan
- (9) jasa kendaraan umum di darat dan di air
- (10) jasa dibidang tenaga kerja,
- (11) jasa dibidang perhotelan
- (12) jasa yang disiapkan dalam rangka melakukan kegiatan pemerintahan
secara umum
- (13) jasa pengiriman dengan wesel pos

2.2.4.3 Subjek Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2017) Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri yaitu:

- 1). Subjek Pajak Dalam Negeri
 - a) Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau mempunyai penghasilan yang nominalnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 - b) Subjek Pajak Badan Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak saat didirikan atau menetap dan berkedudukan di Indonesia, termasuk Bentuk Usaha Tetap.
 - c) Subjek Pajak berupa warisan yang belum dibagi.
- 2). Subjek Pajak Luar Negeri baik Orang Pribadi maupun Badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima ataupun mempunyai penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan mempunyai penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.2.4.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 2009 Pasal 7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling

rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan

Rancangan Undang Undang Harmonisasi Perpajakan disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR pada tanggal 7 oktober 2021. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga melakukan perubahan terhadap sejumlah undang-undang antara lain UU KUP, UU PPN, UU Bea Cukai, UU PPh, UU Penanganan Covid-19 dan Undang-Undang ketenaga kerjaan Cipta Kerja. Memberikan fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan primer, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial. PPN mengalami peningkatan secara bertahap menjadi 11 % mulai bulan april 2022, dan menjadi 12 % paling lambat 1 Januari 2025. Kenaikan tarif PPN ditujukan untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk pemberian berbagai insentif dalam menanggulangi dampak Covid-19.

2.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

2.2.5.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

“Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara terus menerus menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. (Ali Ibrahim 2016).”

“Pertumbuhan ekonomi pada saat ini merupakan masalah makro ekonomi jangka Panjang. Pada setiap periodenya masyarakat akan

meningkatkan kemampuannya, dan suatu kondisi di mana terjadinya perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan adanya pertumbuhan produksi per kapita dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Nasrulloh, 2019).”

“Menurut (Alifah & Bawono, 2020) Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara untuk memberikan produk ekonomi kepada warganya, yang dapat meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan per kapita, atau total nilai pasar barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara selama beberapa waktu (biasanya satu tahun).”

2.2.5.2 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dinilai melalui perbandingan faktor - faktor yang dapat menunjukkan keadaan perekonomian suatu negara dibandingkan periode atau tahun sebelumnya. Ada dua faktor yang dapat digunakan untuk menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu : Produk Domestik Bruto dan Produk Nasional Bruto.

Produk Domestik Bruto merupakan cara menghitung pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Artinya, semua produksi yang terjadi dan dilakukan di suatu negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, termasuk dalam perhitungan PDB. Begitupun sebaliknya pada pendapatan maupun kegiatan produksi dari warga negara Indonesia di wilayah negara lain tidak akan dimasukkan dalam perhitungan PDB. Berikut ini rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan PDB adalah dengan membandingkan PDB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya.

$$G_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_t = Pertumbuhan ekonomi periode t

PDB_t = Produk Domestik Bruto periode t

PDB_{t-1} = Produk Domestik Bruto Periode Sebelumnya

2.2.6 Inflasi

“Teori Ekonomi makro menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika masyarakat hidup diluar kapasitas ekonominya dan menyebabkan permintaan yang lebih besar. (Utari 2016).” “Inflasi merupakan peristiwa terjadinya peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus yang disebabkan oleh melemahnya nilai mata uang pada suatu periode tertentu. (Mashudi et al. 2017).” “Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga barang dan jasa yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sadono Sakirno, 2016).” Inflasi merupakan proses naiknya harga umum barang secara terus menerus dalam kurun waktu periode tertentu. Apabila terjadi kenaikan harga walaupun hanya sekali dengan persentase yang terbilang cukup besar, hal tersebut tidak termasuk inflasi. Indeks yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain: (1) Indeks BiayaHidup; (2) Indeks Harga Grosir; (3) PDB Deflator.

Menurut Nopirin (2016) Jenis-jenis inflasi dibagi menjadi dua:

1) Berdasarkan sifatnya:

- a. *Creeping Inflation*: kenaikan harga cukup lambat, persentase kecil dalam jangka waktu yang relatif lama
- b. *Galloping Inflation*: kenaikan harga cukup tinggi, berjalan dalam jangka waktu relatif singkat dan bersifat akselerasi.

- c. *Hyper Inflation*: kenaikan mencapai 5 atau 6 kali, nilai uang turun drastis, perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi.

2) Berdasarkan alasannya:

- a. *Demand-Pull Inflation*: berawal dari kenaikan permintaan total, sementara itu produksi hampir mendekati pada kesempatan kerja penuh. Jika kesempatan kerja penuh sudah tercapai maka tambahan permintaan hanya akan menaikkan harga.
- b. *Cost-Push Inflation*: diawali dengan kenaikan harga dan turunnya tingkat produksi. Hal ini dikarenakan adanya penurunan dalam penawaran total akibat peningkatan biaya produksi

Menurut Basuki (2020) penggolongan Inflasi dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya sebagai berikut :

a. Dilihat dari laju kecepatannya, inflasi dibagi menjadi 3 :

1. Inflasi lunak (*Wild Inflation*) inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% pertahun
2. Inflasi Cepat (*Gallopig Inflation*) inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih pertahun
3. Inflasi meroket (*sky rocketing inflation*) atau hiperinflasi, yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun.

b. Dilihat dari parah tidaknya, inflasi dibagi menjadi :

1. Inflasi ringan, yaitu inflasi dibawah 10% per tahun (belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan)

2. Inflasi sedang, yaitu antara 10%-30% per tahun (belum membahayakan, tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap)
3. Inflasi berat, yaitu antara 30% - 100% per tahun (sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung dan lebih senang menyimpan barang)
4. Inflasi sangat berat atau hiperinflasi, yaitu inflasi di atas 100% pertahun (mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan)

c. Dilihat dari sumbernya, inflasi dibagi menjadi :

1. Inflasi dari dalam negeri (*domestic inflation*) artinya inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit
2. Inflasi dari luar negeri (*imported inflation*), artinya inflasi terjadi karena suatu negara mengimpor barang / jasa dari negara yang terjadi inflasi

2.2.6.1 Indikator Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui inflasi selama satu periode tertentu. IHK adalah indeks angka yang menunjukkan tingkat harga jasa dan barang yang dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. penghitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan ratusan komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, penghitungan IHK dilakukan mempertimbangkan perkembangan regional, yaitu dengan memperhitungkan tingkat inflasi di kota-kota besar, terutama ibukota provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung

IHK:

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK} - \text{IHK}_{-1})}{\text{IHK}_{-1}} \times 100\%$$

IHK saling memiliki keterkaitan dengan inflasi, di mana semakin tinggi nilai IHK maka akan semakin tinggi juga laju inflasi. Hal ini dikarenakan IHK dan inflasi digunakan oleh pemerintah untuk menentukan batas harga jual produk agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga maksimal di mana akan melindungi pihak konsumen serta harga minimal untuk melindungi pihak produsen. Selain itu, IHK digunakan sebagai indikator inflasi karena barang dan jasa yang masuk ke dalam perhitungan IHK adalah barang dan jasa yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Barang dan jasa tersebut terdiri dari 8 kelompok besar, yaitu makanan, perumahan, pakaian, transportasi, biaya perawatan medis, rekreasi, pendidikan, serta barang dan jasa lainnya.

2.2.7 Hubungan Antar Variabel

2.2.7.1 Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan PPN

Teori Ekonomi makro menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika masyarakat hidup diluar kapasitas ekonominya dan menyebabkan permintaan yang lebih besar. (Utari 2016). Jika tingkat inflasi mengalami kenaikan, maka penerimaan PPN akan ikut meningkat karena terjadi peningkatan harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP), *vice versa*. Jika tingkat inflasi mengalami penurunan, maka PPN akan ikut menurun karena penurunan harga jual yang menjadi DPP PPN.

“Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses perubahan kondisi

perekonomian suatu negara secara terus menerus menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. (Ali Ibrahim 2016).” Pertumbuhan ekonomi meningkatkan penerimaan perpajakan, terutama pendapatan dan upah atas tenaga kerja, peningkatan gaji dan upah akan meningkatkan konsumsi. Pengeluaran atas konsumsi barang dan jasa adalah objek pajak pertambahan nilai.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu Tongam (2019) yang menyatakan bahwa Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Penelitian ini diperkuat oleh Dede Krisnafani (2022) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

Dari teori tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan PPN

2.2.7.2 Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan PPN

“Inflasi merupakan peristiwa terjadinya peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus yang disebabkan oleh melemahnya nilai mata uang pada suatu periode tertentu. (Mashudi et al. 2017).” Jika harga barang dan jasa meningkat maka akan meningkatkan DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Peningkatan dasar pengenaan pajak PPN inilah yang akan mempengaruhi tingkat penerimaan PPN.

“Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara untuk memberikan produk ekonomi kepada warganya, yang dapat meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan per kapita, atau total nilai pasar barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara selama beberapa waktu (biasanya satu tahun). (Alifah & Bawono, 2020)”

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu Yeni Sapridawati, Novita Indrawati, Azhari Sofyan, Zirman (2021) yang menyatakan bahwa Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Hal ini sejalan dengan penelitian Dede Krisnafani (2022) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan Penerimaan PPN.

Dari teori tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan PPN

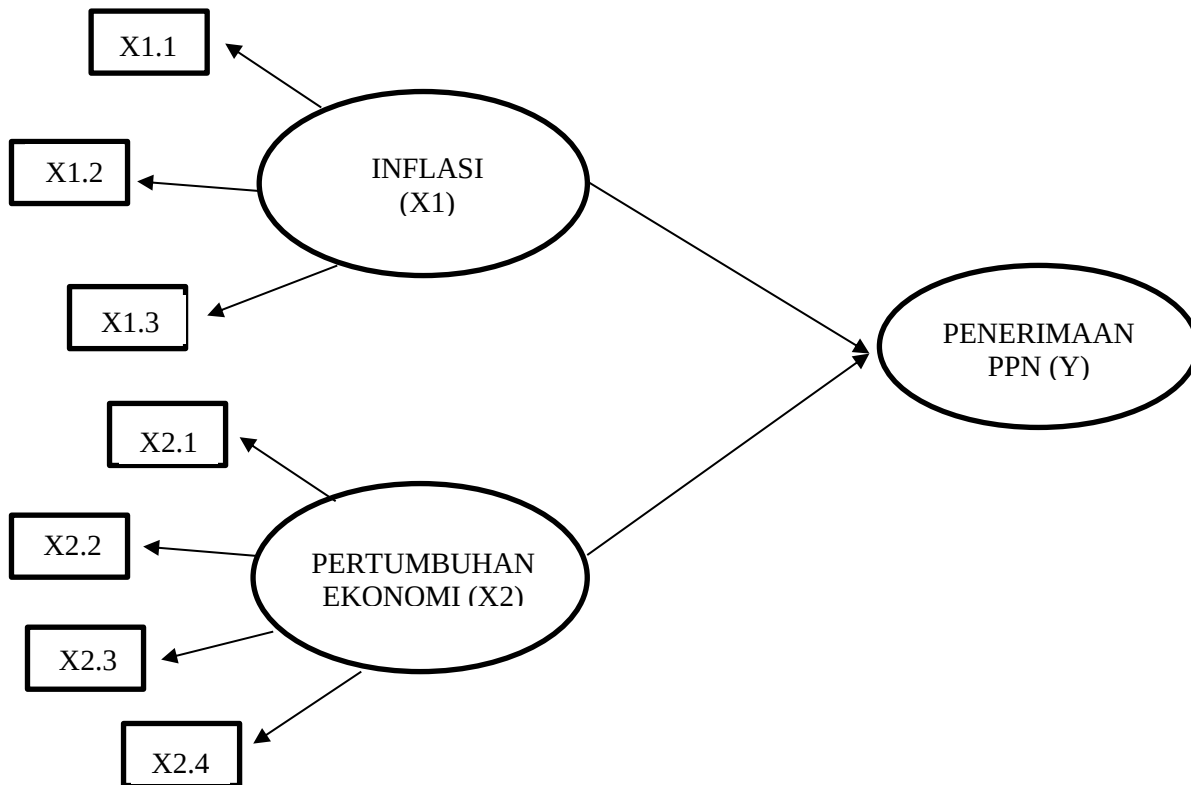
2.2.7.3 Hubungan Inflasi yang berpengaruh secara dominan terhadap Penerimaan PPN

Hasil penelitian ini didukung oleh Yeni Sapridawati, Novita Indrawati, Azhari yang menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh secara dominan terhadap Penerimaan PPN.

Hasil penelitian ini didukung oleh Rivany Elvina, Suhendra (2023) yang menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan PPN. Dari teori tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Inflasi berpengaruh secara dominan terhadap Penerimaan PPN

2.3 kerangka konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya belum dapat dibuktikan sehingga masih harus dilakukan pengujiannya, hipotesis ini bertujuan untuk memberikan arah bagi analisis penelitian.

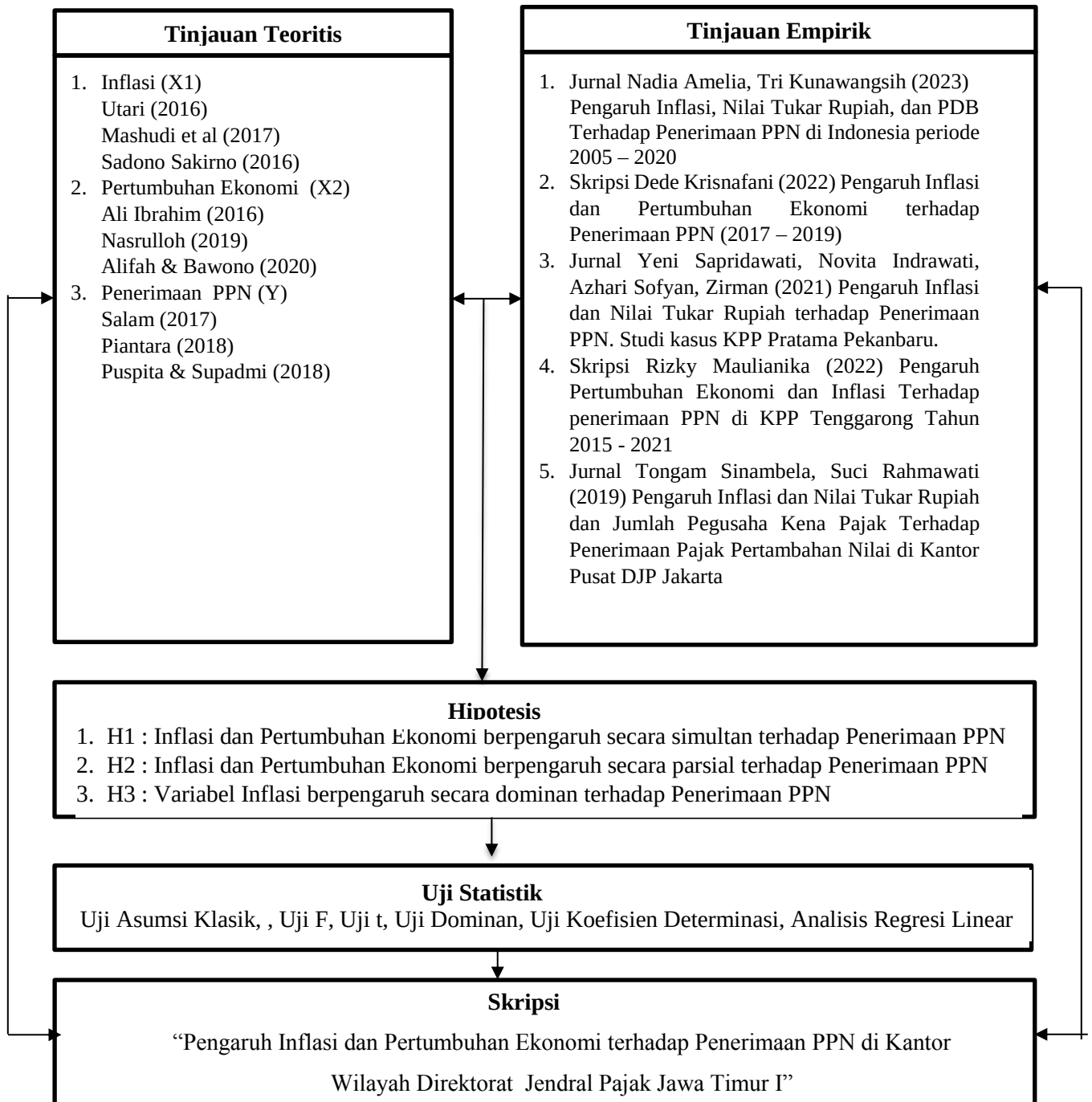
Dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

1. H1 : Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan PPN
2. H2 : Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan PPN
3. H3 : Inflasi berpengaruh secara dominan terhadap Penerimaan PPN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka proses berpikir

Kerangka proses berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir

Penjelasan Gambar :

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka proses berpikir yang ditunjukkan pada gambar 3.1 yang menunjukkan bahwa penelitian ini membutuhkan teori inflasi, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan PPN. Teori teori ini perlu dipelajari karena banyak membantu proses analisis. Dalam proses analisis terlihat proses berfikir yang terkait teori dapat diungkapkan dengan teori universal yang diperlukan untuk semua kasus spesifik dan khusus, oleh karena itu proses berfikir yang terkandung dalam studi teoritis mengandung proses berfikir deduktif artinya seorang peneliti akan menganalisis dan menjawab permasalahan serta mengambil kesimpulan berdasarkan atau bertitik tolak dari hal – hal yang bersifat umum kearah hal hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini diperlukan hasil penelitian terdahulu, artikel, jurnal, dan skripsi yang relevan. Seorang peneliti tidak berfikir deduktif saja tetapi merupakan interaksi bolak balik ($\longleftrightarrow$) dari proses berfikir deduktif (studi teoritik) dan proses berfikir induktif (studi empirik). Pada saat melakukan proses seperti ini ditemukan variabel baik dalam studi teoritis maupun studi empiris dengan hubungan kualitasnya ($\longleftrightarrow$), dan atas dasar tersebut disusunlah hipotesis. Kerangka proses berpikir ini memperlihatkan dukungan studi teoritik yang didapat dari berbagai sumber dan studi empirik dari penelitian terdahulu yang menghasilkan rumusan hipotesis sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya. Tanda panah ($\longleftrightarrow$) yang menghubungkan skripsi ke studi teoritik dan studi empirik dapat diartikan bahwa skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi berupa sanggahan atau dukungan (memperkuat) penelitian sebelumnya.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Definisi Operasional Variabel

“Menurut Sugiyono (2016) Definisi operasional adalah identifikasi terhadap konstruk dan sifat yang diteliti sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.”

Definisi operasional menjelaskan metode khusus yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga sangat berguna dalam penelitian karena definisi operasional akan mengacu pada indikator dan aspek-aspek variabel atau konstruk dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

3.2.1.1 Variabel Independen

“Menurut Sugiyono (2019) Variabel Independen (X) Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variable dependen atau variable terikat.”

Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

Inflasi (X1)

“Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga barang dan jasa yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sadono Sakirno, 2016).” Inflasi dapat mempengaruhi harga barang ataupun jasa secara komprehensif pada masa tertentu. Variabel inflasi diukur dengan melihat data tingkat inflasi per tahun di wilayah Surabaya selama Januari 2016 – Desember 2022. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui inflasi selama satu periode tertentu. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung Inflasi :

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK} - \text{IHK}_{-1})}{\text{IHK}_{-1}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Ekonomi (X2)

“Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara terus menerus menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. (Ali Ibrahim 2016).” Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan melihat data pertumbuhan ekonomi di wilayah Surabaya selama tahun 2016 – 2022.

Berikut ini rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PDB :

$$G_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

keterangan :

G_t = pertumbuhan ekonomi periode t

PDB_t = Produk Domestik Bruto periode t

PDB_{t-1} = Produk Domestik Bruto Periode Sebelumnya

3.2.1.2 Variabel Dependen

“Menurut Sugiyono (2019) Dependent Variable sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variable dependen dapat diartikan variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Variable dependen dalam penelitian ini adalah :

Penerimaan PPN (Y)

PPN adalah suatu pajak yang dikenakan pada setiap produk barang ataupun jasa di dalam daerah pabean, tetapi jumlah pajak terutang dibayarkan oleh pemakai

produk akhir. Variabel Penerimaan PPN diukur dengan melihat jumlah realisasi penerimaan PPN per tahun di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I selama 2016 - 2022. Berikut ini cara menghitung Penerimaan PPN

$$\text{Penerimaan PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

3.2.2 Pengukuran Variabel

“Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan panjang interval suatu alat ukur, sehingga pada saat alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran maka menghasilkan data kuantitatif. metode penelitian pada saat penulisan skripsi ini adalah kuantitatif, karena penilaian ini disajikan menggunakan data. penelitian kuantitatif adalah penelitian menggunakan data berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic. (Sugiyono, 2016)”

3.3 Penentuan Populasi, Besar sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan subjek penelitian. “Menurut Sugiyono (2016) populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah penerimaan PPN pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I

3.3.2 Sampel

“Menurut Sugiyono (2016), sampel adalah bagian dari populasi dan biasa mewakili keseluruhan populasi”. Adapun penelitian jumlah sampel yang digunakan

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik sampling jenuh “Sugiyono (2016) yang mengemukakan bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.”

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*. Teknik yang digunakan dalam *nonprobability sampling* adalah sampling jenuh dimana penelitian yang dilakukan berupa studi *time series* selama 7 tahun

3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I yang terletak di Jl. Jagir Wonokromo No 100-104 Lantai 6 & 8 Kecamatan Wonokromo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2024

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang terpilih dikumpulkan dengan menghubungi pemilik data, dokumentasi dan studi kepustakaan. Yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I. Selain itu juga mendapatkan data dari seluruh situs internet resmi BPS pada wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I. Data dapat digolongkan menurut jenis dan sumbernya yaitu sebagai berikut :

3.5.1 Jenis Data

Teknik pengumpulan data disini menjelaskan tentang bagaimana data dikumpulkan sebelum diolah dan dianalisis. Dalam pengumpulan data yang melalui *field research* ini berasal dari data primer dan data sekunder dengan penjelasan

sebagai berikut :

1. Data Primer

“Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan pendapat yang ada Sugiyono (2016)”. Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah secara langsung dari subjek yang berhubungan langsung dengan penelitian. Data primer ini diperoleh dari observasi langsung dan data hasil pengisian kuesioner.

2. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen-dokumen yang ada. Penggunaan data sekunder adalah sebagai pendukung perolehan data hasil yang didapat dari artikel, internet, dan dokumen-dokumen yang dimiliki organisasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Sugiyono (2016)”

3.5.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang sangat menunjang terselenggaranya penelitian dengan digunakan cara-cara pengumpulan data adalah :

1. *Library Research* (Studi Kepustakaan)

pengumpulan data skripsi dengan cara membaca jurnal jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. *Field Research* (Studi Lapangan)

Merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan data. Sebelum meminta data penerimaan PPN kita terlebih dahulu meminta izin riset pada aplikasi eriset pajak. Setelah mendapat

persetujuan makan pihak Direktorat Jendral Pajak mengirim data penerimaan PPN melalui akun telegram resmi. Untuk data inflasi dan pertumbuhan ekonomi di dapat dari situs web resmi Badan Pusat Statistic Surabaya.

3.5.3 Statistik Deskriptif

“Statistik deskriptif menggambarkan prosedur penelitian dalam menyusun dan menyajikan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan sekumpulan data hasil observasi sehingga mudah dipahami, dibaca, dan digunakan sebagai informasi (Bahri, 2018).”

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data, maka data akan diuji sesuai dengan asumsi klasik, tujuan dari pengujian ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa hasil regresi akan valid jika digunakan untuk memprediksi masalah. Ada empat pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji moltikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi.

1. Uji Normalitas

Menurut (Bahri, 2018) Uji normalitas data adalah uji distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyebaran dibawah kurva normal atau tidak.” Metode grafik dan metode uji *OneSample-Kolmogrov-Smirnov* merupakan pendekatan yang digunakan untuk menguji normalitas data. Metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal *P-Plot of regression standardized residual* sebagai dasar pengambilan keputusan, jika titik- titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Selain itu dengan uji *One-Sample-Kolmogrov-Smirnov* sebagai dasar

pengambilan keputusan jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 ($\text{Sig} \geq 0,05$) maka nilai residual berdistribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan untuk grafik histogram yaitu jika grafik menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan untuk grafik normal *probability plot* adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi mengikuti asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Namun, Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistika dapat sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan di samping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistika non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis.

- a. Jika residual memiliki signifikansi $> 5\%$ maka residual berdistribusi normal
- b. Jika residual memiliki signifikansi $< 5\%$ maka residual berdistribusi tidak normal

2. Uji Multikolinearitas

“Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya (Bahri, 2018)”.

“Menurut (Bahri 2018) untuk mendeteksi apakah suatu model mengalami gejala multikolinearitas adalah dengan cara melihat nilai *tolerance* dan

nilai VIF. Jika apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 ($> 0,10$) maka dapat diartikan tidak terdapat multikolinearitas sedangkan jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 ($< 0,10$) maka dapat diartikan bahwa telah terjadi multikolinearitas pada variabel independen. Berdasarkan nilai VIF, jika nilai multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 ($> 10,00$) maka dapat diartikan terjadi multikolinearitas pada variabel independen”

3. Uji Heterokedastisitas

“Heterokedastisitas merupakan varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas (Bahri, 2018).” “Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan meode grafik atau *scatter plot*. Jika tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y makaa tidak terjadi heterokedastisitas (Bahri, 2018)”

3.6 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.6.1 Teknik analisis

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.6.1.1 Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pada tujuan dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka metode analisis data yang dapat diterapkan adalah analisis regresi berganda. Dilihat dari jenis penelitian ini yang adalah penelitian kuantitatif, metode analisis

data dengan menerapkan analisis ini dapat dilihat pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan analisis regresi berganda maka dapat diketahui seberapa besar Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi, merupakan variabel bebas berpengaruh terhadap penerimaan PPN sebagai variabel terikat. “Menurut Gujarati (2011) analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan (*strength*) atau tingkatan (*degree*) hubungan linear (*linear association*) antara dua variabel.” Untuk mengukur kekuatan hubungan linear ini digunakan koefisien korelasi.

Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1 + b_2x_2 \dots + e$$

Keterangan :

Y	: Penerimaan PPN
X1	: Inflasi
X2	: Pertumbuhan Ekonomi
a	: Konstanta
b1, b2, b3	: Koefisien regresi
e	: <i>Error</i>

3.6.2 Uji hipotesis

3.6.2.1 Uji hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Dalam konteks analisis regresi untuk menilai kualitas dari model yang dikembangkan akan mengarah pada analisis simultan melalui Uji F. Hasil uji F ini digunakan sebagai acuan untuk menyimpulkan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Langkah-langkah yang dilakukan pada uji

F ini adalah sebagai berikut :

a. Memformulasikan hipotesis

Formulasi hipotesis yang akan dibuktikan adalah

$$1) H_0 : \beta_1 = \beta_2 \dots\dots\dots = \beta_4 = 0$$

Artinya semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen.

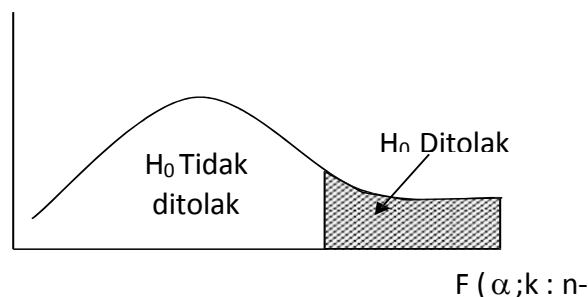
$$2) H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \dots\dots\dots = \beta_4 \neq 0$$

Artinya variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Menentukan taraf signifikansi

Taraf signifikansi yang digunakan sebesar 95 % ($\alpha=5\%$) .

c. Menetapkan daerah penerimaan dan penolakan H_0



Gambar 3.2
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji F

d. Menghitung nilai F hitung dengan menggunakan statistika dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel

- e. Penarikan kesimpulan dengan memanfaatkan print out komputer dengan memperhatikan signifikansi F pada Tabel Anovanya

Kriteria yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Jika F hitung lebih besar atau sama dengan F Tabel atau nilai probabilitas ($\text{sig } F$) lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi sebesar 5% ,maka H_0 ditolak dan H_1 tidak ditolak artinya variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F Tabel atau nilai probabilitas ($\text{sig } F$) lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi sebesar (5%) maka H_0 tidak ditolak dan H_1 ditolak artinya variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.2.2 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Salah satu prosedur pendugaan model untuk regresi linier berganda adalah dengan prosedur Least Square (kuadrat terkecil). Konsep dari metode least square adalah menduga koefisien regresi (β) dengan meminimumkan kesalahan (error). sehingga dugaan bagi β (atau dinotasikan dengan b) dapat menjadi sesuai. Untuk menentukan ketepatan prediksi dari masing-masing variabel yang dibentuk dalam model akan digunakan Uji t . Hasil Uji t ini digunakan untuk menyimpulkan pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel terikat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Uji t (uji parsial) ini sebagai berikut

a. Memformulasikan hipotesis

1. $H_0 : \beta_i \geq 0 \ (i = 1, 2, 3, 4)$

Artinya : Variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. $H_1 : \beta_i < 0 \ (i = 1, 2, 3, 4)$

Artinya : Variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

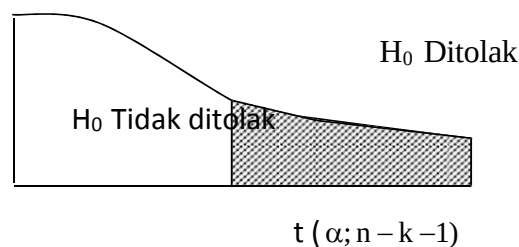
b. Menentukan taraf signifikansi

Taraf signifikansi yang digunakan sebesar 95% ($\alpha 5\%$)

c. Menentukan daerah penerimaan dan penolakan H_0

$H_0 : \alpha_0 \leq 0,05$

$H_1 : \alpha_1 > 0,05$

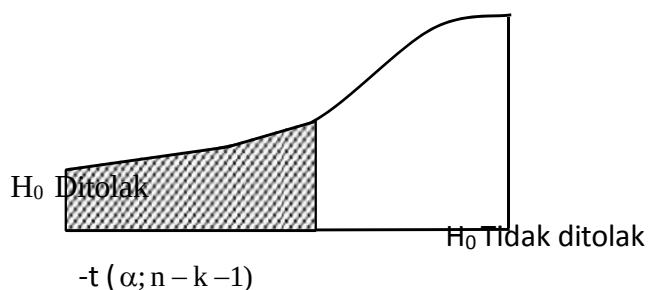


Gambar 3.3

Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t sisi kanan

$H_0 : \alpha_0 \geq 0,05$

$H_1 : \alpha_1 < 0,05$



Gambar 3.4

Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Uji t sisi kiri

d. Menghitung nilai t hitung dengan menggunakan statistika dapat

dirumuskan sebagai berikut :

$$t = \frac{b_j}{Se(b_j)}$$

Se (bj) = standar deviasi koefisien regresi variabel X, yang dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$Se(b_j) = \sqrt{\frac{1}{n-k} \sum e_i^2}$$

Dimana : bj = Koefisien regresi variabel X membandingkan hasil dari t hitung dan t tabel

- e. Penarikan kesimpulan dengan memanfaatkan print out komputer dengan memperhatikan signifikansi T pada tabel coefficientnya.

Kriteria yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Jika t hitung lebih besar t tabel atau t hitung lebih kecil t tabel akan nilai probabilitas (sig t) lebih kecil dibanding dengan taraf signifikansi (α) sebesar 5% maka H_0 ditolak dan H_1 tidak ditolak artinya variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika t tabel lebih kecil t hitung atau t hitung lebih kecil t tabel atau nilai probabilitas (sig t) lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi (α) sebesar 5%, maka H_0 tidak ditolak dan H_1 ditolak artinya variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh yang tidak signifikan

3.6.3 Uji Dominan (Koefisien Beta)

“Menurut Ghozali (2011), uji dominan merupakan uji yang digunakan untuk

mengetahui variabel bebas mana yang paling menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linear, maka digunakan uji *Standardized Coefficient* dengan melihat nilai koefisien beta yang paling besar.” Semakin besar nilai beta maka semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen.

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut (Bahri, 2018) koefisien determinasi (R²) mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.” Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R-Square. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0-1. Nilai R² yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R² yang mendekati 1 menunjukkan variabel-variabel independen hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dengan model semakin tepat

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kanwil DJP Jawa Timur I

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jatim I) dibentuk pada tahun 2007 di Kota Surabaya, Ibu Kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Kanwil DJP Jatim I merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Semenjak didirikan, Kanwil DJP Jatim I telah mengalami pergantian nama dan wilayah.

Menteri Keuangan meresmikan reorganisasi instansi vertikal di DJP pada tanggal 24 Mei 2021, sesuai dengan rumusan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020. Dampak dari reorganisasi tersebut antara lain adalah konversi beberapa KPP Pratama menjadi KPP Madya, penyesuaian nomenklatur beberapa Kanwil, KPP, dan KP2KP, penyesuaian wilayah kerja KPP dan KP2KP, serta perubahan struktur organisasi. Sebagai implementasi dari reorganisasi instansi vertikal, di wilayah Kanwil DJP Jatim I dibentuk KPP Madya Dua Surabaya. Selain itu, KPP Pratama Surabaya Simokerto berhenti beroperasi dan bergabung dengan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, sehingga saat ini Kanwil DJP Jatim 1 mengadministrasikan 2 KPP Madya dan 11 KPP Pratama.

1. KPP Madya Surabaya (Seluruh Kecamatan)

2. KPP Madya Dua Surabaya (Seluruh Kecamatan)
3. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (wilayah kerja Kecamatan Sukomanunggal, Tandes, Benowo, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep)
4. KPP Pratama Surabaya Krembangan (wilayah kerja Kecamatan Krembangan)
5. KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan (wilayah kerja Kecamatan Pabean Cantikan)
6. KPP Pratama Surabaya Gubeng (wilayah kerja Kecamatan Sukolilo, Gubeng)
7. KPP Pratama Surabaya Tegalsari (wilayah kerja Kecamatan Tegalsari)
8. KPP Pratama Surabaya Sawahan (wilayah kerja Kecamatan Asemrowo, Sawahan, Bubutan)
9. KPP Pratama Surabaya Wonocolo (wilayah kerja Kecamatan Wonocolo, Jambangan, Gayungan, Wonokromo)
10. KPP Pratama Surabaya Genteng (wilayah kerja Kecamatan Genteng)
11. KPP Pratama Surabaya Rungkut (wilayah kerja Kecamatan Rungkut, Gunung Anyar, Tenggiling, Mejoyo)
12. KPP Pratama Surabaya Karangpilang (wilayah kerja Kecamatan Karang Pilang, Dukuh Pakis, Wiyung)
13. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo (wilayah kerja meliputi Kecamatan Mulyorejo, Tambaksari, Kenjeran, Bulak, Simokerto, Semampir)

Kanwil DJP Jawa Timur 1 berada di lokasi strategis yang berdekatan dengan stasiun wonokromo tepatnya di sisi selatan Kali Jagir, untuk alamat lengkapnya di Jln Jagir Wonokromo No 100-104 Lantai 6 & 8 Jagir, Kec Wonokromo, Surabaya, Jawa

Timur 60239. Gedung setinggi delapan lantai ini ditempati empat kantor sekaligus yaitu kanwil DJP Jatim 1, KPP Pratama Surabaya Wonocolo, KPP Pratama Surabaya Karangpilang, dan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

4.1.2 Visi dan Misi Kanwil DJP Jawa Timur I

Visi :

Visi Kanwil DJP Jatim I yaitu “Menjadi Kantor Wilayah Penghimpunan Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.”

Misi :

Menjamin terwujudnya kinerja kantor wilayah sebagai penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jatim I

Bagian Umum

- Subbagian Kepegawaian
- Subbagian Keuangan
- Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal

Bidang Data dan Pengawasan

- Seksi data dan Potensi
- Seksi Bimbingan dan Pengawasan
- Seksi Dukungan Teknis Komputer

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian

- Seksi Bimbingan Pendaftaran
- Seksi Bimbingan Ekstensifikasi
- Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan

- Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan
- Seksi Bimbingan Penagihan
- Seksi Intelijen
- Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

- Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen
- Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi
- Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

- Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I
- Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II
- Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III
- Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut ini hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti. Objek penelitian ini adalah variabel-variabel makro ekonomi yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi per tahun dalam kurun waktu 7 tahun (2016-2022). Variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini digunakan sebagai variabel independen. Variabel independen adalah variabel bebas yang diduga dapat mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat yang dapat dipengaruhi, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pertambahan nilai per tahun. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I yang beralamat di Jl. Jagir Wonokromo No.100-104 Lantai 6 & 8, Jagir, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur 60239. Sumber data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder penerimaan PPN diperoleh dari Humas Kanwil DJP Jawa Timur I, dan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan cara mengunduh data melalui situs internet resmi badan pusat statistik (BPS) seluruh wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Yaitu BPS Kota Surabaya. Teknik yang digunakan dalam *nonprobability sampling* adalah *sampling jenuh* di mana penelitian yang dilakukan berupa studi *time series* selama 7 tahun

4.2.1 Data Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga barang dan jasa yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sadono Sakirno, 2016) Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Berikut ini data inflasi pertahun pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I periode 2016 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Data Inflasi Tahun 2016 -2022

2016	3,22%
2017	4,37%
2018	3,03%
2019	2,21%
2020	1,33%
2021	2,71%
2022	6,56%

Sumber : Badan Pusat Statistik Surabaya

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa negara Indonesia mengalami inflasi ringan yaitu dibawah 10% per tahun, inflasi dalam tahap ini belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan.

4.2.2 Data Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Alifah & Bawono, 2020) Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara untuk memberikan produk ekonomi kepada warganya, yang dapat meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan per kapita, atau total nilai pasar barang dan jasa

akhir yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara selama beberapa waktu (biasanya satu tahun). Berikut ini data pertumbuhan ekonomi pertahun pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I periode 2016-2022 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 4.2 Data Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016 – 2022

2016	11%
2017	9%
2018	9%
2019	8%
2020	-4%
2021	6%
2022	11%

Sumber : Badan Pusat Statistik Surabaya

Berdasarkan tabel diatas , terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu pada tahun 2016 dan 2022 sebesar 11%, dan pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu pada tahun 2020 senilai -4%

4.2.3 Data Penerimaan PPN

Menurut Priantara (2018) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi di area pabean, dalam artian beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Berikut ini data penerimaan PPN pertahun pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I periode 2016-2022 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 4. 3 Target dan Realisasi Penerimaan PPN Tahun 2016 - 2022

Tahun	Target		Realisasi	
2016	Rp	20.010.306.162.000	Rp	15.950.654.055.975
2017	Rp	16.628.286.253.000	Rp	19.860.996.001.563
2018	Rp	22.963.734.352.000	Rp	22.025.186.963.701
2019	Rp	27.003.231.262.000	Rp	22.685.995.432.272
2020	Rp	24.432.462.450.000	Rp	21.659.124.479.716
2021	Rp	25.326.330.357.000	Rp	25.102.725.554.942
2022	Rp	20.566.508.817.000	Rp	26.552.917.328.203

Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I

Berdasarkan data penerimaan PPN yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I pada tabel di atas, terlihat bahwa target dan realisasi penerimaan PPN mengalami naik turun. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan PPN sangat jauh dibawah target, hanya sebesar Rp. 22.685.995.432.272 diduga karena dampak dari pandemi covid 19. Akan tetapi realisasi penerimaan Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup pesat, yaitu sebesar Rp. 26.552.917.328.203

4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

Dalam menguji “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I)” dilakukan dengan pengujian statistik. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 26. Adapun indikator variabel yang digunakan untuk penelitian ini adalah Inflasi (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2) dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif ini memberikan deskripsi atau gambaran mengenai data inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variable independent atau bebas (X) dan

PPN sebagai variable dependen atau terikat (Y). analisis deskriptif ini memberikan gambaran berupa nilai *minimum*, *maksimum*, *mean* (rata – rata) serta standar deviasi setiap variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat. Hasil analisis statistic deskriptif untuk semua variabel adalah sebagai berikut.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inflasi	7	.013	.065	.03314	.016787
Pertumbuhan_Ekonomi	7	-.04	.11	.0714	.05210
Penerimaan_PPN	7	.103685	.172604	.14285729	.022535130
Valid N (listwise)	7				

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif

Sumber : Lampiran (Output Descriptive Statistic, Data Diolah dengan SPSS 26) 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, Jumlah observations semua variabel sebanyak 7 sampel. Inflasi sebagai variable bebas (X1) memiliki nilai *minimum* sebesar 0,013 nilai *maximum* sebesar 0,065 nilai *mean* sebesar 0,3314, dan nilai standar deviasi sebesar 0,16787. Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel bebas (X2) memiliki nilai *minimum* sebesar -0,04, nilai *maximum* sebesar 0,11, nilai *mean* sebesar 0,0714, dan nilai standar deviasi sebesar 0,05210. Penerimaan PPN sebagai variabel terikat (Y) memiliki nilai *minimum* sebesar 0,103685, nilai *maximum* sebesar 0,172604, nilai *mean* sebesar 0,14285729, dan nilai standar deviasi sebesar 0,022535130

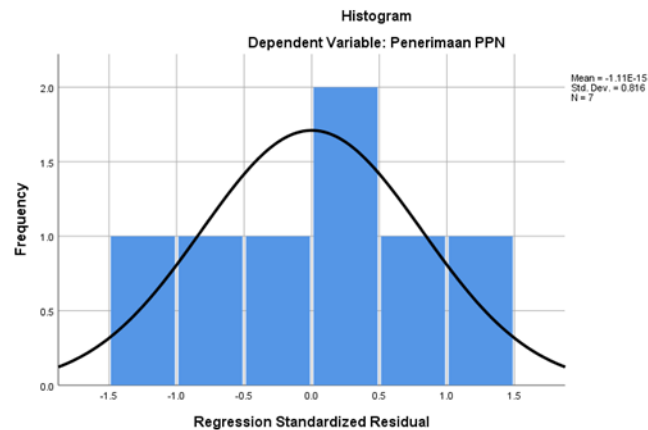
4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*). Uji ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.

4.3.2.1 Uji Normalitas

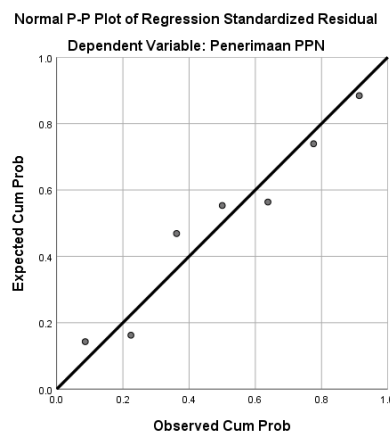
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah

regresi yang distribusi normal atau mendekati normal. Deteksi uji normalitas ditentukan dengan menggunakan grafik histogram dan normal *probability plot*.



Sumber : SPSS 26, Diolah Penulis, 2023
Gambar 4.1 Histogram Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan tampilan histogram terlihat bahwa kurva dependent dan *regression standardized residual* membentuk gambar seperti lonceng. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal atau analisis regresi layak digunakan meskipun terdapat kemiringan (Sihabudin et al., 2021).



Sumber : SPSS 26, diolah penulis 2023
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas *Normal Probability Plot*

Berdasarkan tampilan Normal P-P *Plot Regression Standardized* terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Maka dari itu dapat disimpulkan

bahwa data berdistribusi normal atau analisis regresi layak di gunakan meskipun terdapat sedikit plot yang menyimpang dari garis diagonal (Sihabudin et al., 2021).

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00468421
Most Extreme Differences	Absolute	.176
	Positive	.172
	Negative	-.176
Test Statistic		.176
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : SPSS 26, diolah penulis 2023

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) normalitas *kolmogorov smirnov* sebesar $0,200 > 0,05$, dapat disimpulkan data berdistribusi normal (Sihabudin et al., 2021).

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat gejala korelasi di antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi. Regresi yang baik akan bebas dari multikolinearitas. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai tolerance dan *Varian Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Regresi yang bebas dari gangguan multikolinearitas jika mempunyai nilai tolerance $>$ dari 0,1 atau nilai VIF $<$ dari 10. Berikut ini hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini:

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Inflasi	.995	1.005
	Pertumbuhan Ekonomi	.995	1.005

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

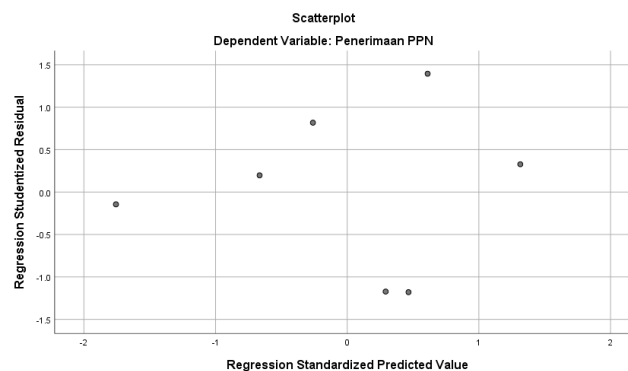
Sumber : SPSS 26, Data Diolah Penulis 2023

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Dari hasil uji multikolinearitas di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk kedua variabel independen memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ yaitu Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,995. Dan untuk nilai VIF $< 10,00$ yaitu Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,005. maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model tidak terdapat gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas (Sihabudin et al., 2021).

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat Scatterplot dan Uji Heteroskedastisitas Spearman Rho



Sumber : SPSS 26, diolah penulis 2023

Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan tampilan Grafik *Scatter plott* dapat dilihat bahwa titik-titiknya dikategorikan tersebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokodestisitas (Sihabudin et al., 2021).

Berikut uji heteroskedastisitas dengan metode Spearman Rho, jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Spearman Rho dapat dilihat pada tabel berikut:

Correlations			Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi	Unstandardize d Residual
Spearman's rho	Inflasi	Correlation Coefficient	1.000	-.286	-.143
		Sig. (2-tailed)	.	.535	.760
		N	7	7	7
	Pertumbuhan Ekonomi	Correlation Coefficient	-.286	1.000	.143
		Sig. (2-tailed)	.535	.	.760
		N	7	7	7
	Unstandardize d Residual	Correlation Coefficient	-.143	.143	1.000
		Sig. (2-tailed)	.760	.760	.
		N	7	7	7

Sumber : SPSS 26, diolah penulis 2023

Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas Metode Spearman Rho

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Prob. uji heteroskedastisitas spearman rho semua variabel $> 0,05$, maka dapat dikatakan model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas (Sihabudin et al., 2021).

4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu

pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan cara melakukan uji Durbin-Watson (DW test). Berdasarkan ketentuan pengujian, model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi apabila $dl \leq dw \leq du$.

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.413 ^a

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi , Inflasi
b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber SPSS 26, Data Diolah Penulis 2023
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai durbin watson sebesar 1,413. Jumlah variabel independen dalam penelitian ini sebanyak 2 variabel dan jumlah sampel 7, sehingga nilai DL sebesar 0,4672 dan nilai DU sebesar 1,8964, maka nilai $DL \leq DW \leq DU$ ($0,4672 \leq 1,413 \leq 1,8964$), sehingga tidak dapat disimpulkan (Zahriyah et al., 2021). Maka dari itu peneliti menggunakan alternatif lain atau standar lain dalam pengujian autokorelasi. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai durbin watson sebesar 1,413 berada diantara -2 sampai +2 ($-2 < 1,413 < +2$), maka dapat dikatakan model persamaan regresi tidak terjadi autokorelasi (Savitri et al., 2021).

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh variabel dependen Penerimaan PPN yang dipengaruhi variabel independen Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Berikut ini merupakan hasil analisis yang dilakukan

dengan SPSS 26 dengan Penerimaan PPN sebagai variabel dependen:

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Berganda

		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	.126	.005		24.592
	Inflasi	.513	.140	.382	3.670
	Pertumbuhan Ekonomi	11.900	1.337	.927	8.901

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : SPSS 26, diolah penulis 2023

$$\begin{aligned} \text{Penerimaan PPN} &= \alpha + \beta_1 \text{Inflasi} + \beta_2 \text{Pertumbuhan Ekonomi} + e \\ \text{Penerimaan PPN} &= 0,126 + 0,382 \text{ Inflasi} + 0,927 \text{ Pertumbuhan Ekonomi} + e \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis pada tabel maka dapat dibuat model persamaan regresi

linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 0,126 + 0,382 + 0,927 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan PPN

α = Konstanta

β = Koefisien

X1 = Inflasi

X2 = Pertumbuhan Ekonomi

e = Error

Interpretasi dari persamaan model regresi linier berganda di atas adalah sebagai berikut:

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut (Sugiyanto et al., 2022):

1. Nilai konstanta sebesar 0,126, artinya tanpa adanya variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka variabel penerimaan PPN akan mengalami peningkatan sebesar 0,126.
2. Nilai koefisien beta variabel inflasi sebesar 0,382, jika nilai variabel lain konstan dan variabel inflasi mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel penerimaan PPN akan mengalami peningkatan sebesar 0,382.
3. Nilai koefisien beta variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,927, jika nilai variabel lain konstan dan variabel pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1%, maka variabel penerimaan PPN akan mengalami peningkatan sebesar 0,927

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis terdiri dari uji koefisien secara parsial (uji t), uji koefisien regresi secara simultan (uji F) uji dominan dan uji koefisien determinasi (R^2).

4.3.4.1 Hasil Uji t

Uji koefisien regresi secara parsial untuk menguji signifikansi nilai koefisien regresi semua variabel independen dalam persamaan regresi, dengan melihat dari nilai t dan nilai signifikansi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan (Nuryadi et al., 2017):

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig. < \alpha$, maka H_1 diterima
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig. > \alpha$, maka H_0 diterima

Menurut Suyono (2015), rumus menghitung t tabel dengan derajat bebas $n - k$, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah total semua variabel.

$DF = n - k$ ($DF = 7 - 3 = 4$) Nilai t hitung selalu dibaca mutlak (nilainya selalu positif), jika didapat nilai t hitung negatif maka nilai mutlaknya diperoleh dengan menghilangkan tanda negatif, setelah itu dibandingkan dengan nilai t tabel (Suyono, 2015).

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	.126	.005		24.592	.000
	Inflasi	.513	.140	.382	3.670	.021
	Pertumbuhan Ekonomi	11.900	1.337	.927	8.901	.001

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : SPSS 26, Data Diolah Penulis, 2023
Tabel 4.10 Hasil Uji t

Berdasarkan hasil uji t pada tabel, diperoleh hasil t hitung untuk variabel Inflasi sebesar 3,670 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 8,901. Berikut penjelasan hasil uji t pada semua variabel di atas

- Hasil uji t pada variabel inflasi diperoleh nilai t hitung sebesar $3,670 > t$ tabel 2,776 dan nilai sig. $0,021 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya inflasi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN.
- Hasil uji t pada variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai t hitung sebesar $8,901 > t$ tabel 2,776 dan nilai sig. $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN.

4.3.4.2 Hasil Uji F

Uji koefisien regresi secara simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah Inflasi (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPN (Y). Variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen jika F hitung > F tabel dan nilai signifikansinya < dari 0,05. Berikut ini hasil uji f dari penelitian ini: Kriteria pengambilan keputusan (Nuryadi et al., 2017) :

- Jika F hitung > F tabel atau sig. < alpha, maka H1 diterima
- Jika F hitung < F tabel atau sig. > alpha, maka H0 diterima

Menurut Suyono (2015), rumus mencari F tabel dengan derajat bebas pembilang adalah $k-1 = (3 - 1) = 2$ dan derajat bebas penyebut adalah $n - k = (7 - 3) = 4$. Dimana k adalah total semua variabel dan n adalah jumlah sampel

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.003	2	.001	44.289	.002 ^b
	Residual	.000	4	.000		
	Total	.003	6			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi , Inflasi

Sumber : SPSS 26, Data Diolah Penulis, 2023
Tabel 4.11 Hasil Uji F

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 44,289 > F tabel 6,944 dan nilai sig. yaitu 0,002 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPN.

4.3.4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Determinasi atau ketepatan perkiraan model (*goodness of fit*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi dari nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil menentukan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 52 variasi variabel dependen amat terbatas. Berikut ini hasil perhitungan R^2 dan koefisien determinasi dalam penelitian ini:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.978 ^a	.957	.935	.005736967

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi , Inflasi

Sumber : SPSS 26, Data Diolah Penulis, 2023
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil tabel menjelaskan tentang ringkasan model, yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R square), koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*std error of the estimate*), antara lain:

- a. R menunjukkan nilai korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar dari 0 sampai 1, jika nilai R mendekati 1 maka hubungan semakin kuat. Angka R yang didapat dalam penelitian ini adalah 0,978 yang berarti korelasi antar variabel Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan PPN sebesar 0,978. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang hampir kuat antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,935 atau 93,5%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi, mampu menjelaskan variabel penerimaan PPN sebesar 93,5%, sedangkan sisanya yaitu

6,5 % ($100 - \text{nilai adjusted } R \text{ Square}$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini (Sihabudin et al., 2021)

c. *Standard error of the estimate* adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilai *standard error of the estimate* dalam penelitian ini sebesar 0.005736967 yang merupakan kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi Penerimaan PPN

4.3.4.4 Hasil Uji Dominan

Menurut (Ghozali 2017) uji dominan dilakukan untuk mengetahui variable independent yang berpengaruh dominan terhadap variabel dependen. Kriteria uji dominan yaitu jika nilai koefisien regresi variabel memiliki nilai terbesar, maka variabel tersebut memiliki pengaruh dominan. Semakin besar nilai beta, maka semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen. Cara untuk menentukan variabel independen yang berpengaruh dominan terhadap variabel dependen adalah dengan melihat nilai *standardized coefficients* beta yang paling tinggi.

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	.126	.005		24.592	.000
	Inflasi	.513	.140	.382	3.670	.021
	Pertumbuhan Ekonomi	11.900	1.337	.927	8.901	.001

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : SPSS 26, Data Diolah Penulis, 2023

Tabel 4.13 Hasil Uji Dominan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. variabel inflasi sebesar $0,021 < 0,05$, dan nilai sig. variabel pertumbuhan ekonomi sebesar $0,001 < 0,05$, nilai *Standardized Coefficients Beta* variabel inflasi sebesar 0,382 lebih kecil dari nilai *Standardized Coefficients Beta* variabel pertumbuhan ekonomi yaitu 0,927, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima artinya variabel inflasi tidak berpengaruh secara

dominan terhadap penerimaan PPN, dan Variabel Perumbuhan Ekonomi berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan PPN

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 26 dengan uji F (simultan) dan uji t (parsial).

a. H1 : Diterima

Berdasarkan hasil uji F pada tabel dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki F hitung $44,289 > F \text{ table } 6,944$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima

b. H2 : Diterima

- Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa Inflasi memiliki t hitung sebesar 3,670 maka nilai t hitung $3,670 > t \text{ tabel } 2,776$ dengan Tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,021. Dapat disimpulkan bahwa inflasi secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PPN
- Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki t hitung sebesar 8,901 maka nilai t hitung $8,901 > t \text{ tabel } 2,776$ dengan Tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,001. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

c. H3 : Ditolak

Berdasarkan hasil *standardized coefficients* beta variabel inflasi memiliki

nilai sebesar 0,382 lebih kecil dari nilai *Standardized Coefficients Beta* variabel pertumbuhan ekonomi yaitu 0,927, maka H1 ditolak dan H0 diterima artinya variabel inflasi tidak berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan PPN. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan teori – teori yang ada dan hasil dari penelitian – penelitian sebelumnya sebagai berikut :

4.4.1 Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I)

Berdasarkan hasil penelitian, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik uji F untuk variabel Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi diperoleh F hitung sebesar 44,289 dan F tabel 6,944 pada taraf signifikansi 0,002, karena nilai F hitung $44,289 > F \text{ tabel } 6,944$ maka Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I). Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPN. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rivany Elvina, Suhendra (2023) yang menyatakan bahwa Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dede

Krisnafani (2022) juga menyatakan bahwa Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

4.4.2 Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I)

Berdasarkan hasil penelitian, Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan PPN. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t yaitu t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($3,670 > 2,776$) dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I).

“Inflasi merupakan peristiwa terjadinya peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus yang disebabkan oleh melemahnya nilai mata uang pada suatu periode tertentu. (Mashudi et al. 2017).” Jika harga barang dan jasa meningkat maka akan meningkatkan DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Peningkatan dasar pengenaan pajak PPN inilah yang akan mempengaruhi tingkat penerimaan PPN. Berdasarkan tingkat pengaruhnya, inflasi yang terjadi pada wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I adalah inflasi ringan karena besarnya $<10\%$ per tahun. Inflasi yang ringan tidak terlalu berdampak besar hingga mengganggu roda perekonomian. Harga barang dan jasa yang meningkat juga masih dalam batas wajar.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivany Elvina, Suhendra (2023) yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Yeni Sapridawati, Novita Indrawati, Azhari Sofyan, Zirman (2021) juga menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian statistic uji t yaitu t hitung sebesar $8,901 > t$ tabel $2,776$ dan nilai sig. $0,001 < 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN.

Salah satu indikator yang memiliki peranan penting untuk mengetahui keadaan pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) PDB merupakan perhitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasional, pada dasarnya Produk Domestik Bruto mengukur seluruh volume produks dari suatu wilayah (negara) secara geografis. Pertambahan produksi barang dan jasa yang merupakan objek PPN, disertai dengan peningkatan kemakmuran masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat yang mengakibatkan penerimaan PPN semakin bertambah. Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur I yang berada di kota metropolitan Surabaya, memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Semakin tinggi aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi dalam kondisi yang baik tidak

hanya berdampak baik bagi produsen dan konsumen tetapi juga penerimaan di sektor perpajakan salah satunya penerimaan PPN.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivany Elvina, Suhendra (2023) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dede Krisnafani (2022) juga menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

4.4.3 Pengaruh Inflasi secara dominan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I)

Berdasarkan hasil *standardized coefficients* beta variabel inflasi memiliki nilai sebesar 0,382 lebih kecil dari nilai Standardized Coefficients Beta variabel pertumbuhan ekonomi yaitu 0,927, maka H1 ditolak dan H0 diterima artinya variabel inflasi tidak berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan PPN. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan PPN. Hal ini sejalan dengan penelitian Rizky Maulianika (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan PPN.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta pengujian hipotesis mengenai “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I Tahun 2016 - 2022)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara simultan, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji F di mana Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai F hitung $44,289 > F \text{ tabel } 6,944$ dan nilai sig. yaitu $0,002 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini sesuai dengan H_1 yang menyatakan bahwa Inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
2. Secara parsial, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - a. Variabel Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t di mana nilai t hitung $3,670 > t \text{ tabel } 2,776$ dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,021.

- b. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t di mana nilai t hitung $8,901 > t \text{ tabel } 2,776$ dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,001.

Hal ini sesuai dengan H2 yang menyatakan bahwa Inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan PPN . Hal ini dibuktikan dengan hasil uji dominan *Standardized Coefficients Beta* . nilai *Standardized Coefficients Beta* variabel inflasi sebesar 0,513 lebih kecil dari nilai *Standardized Coefficients Beta* variabel pertumbuhan ekonomi yaitu 11,900. Hal ini sejalan dengan penelitian Rizky Maulianika (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara dominan terhadap penerimaan PPN. Hal ini tidak sesuai dengan H3 yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh secara dominan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian mengenai Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I) yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I dapat mengevaluasi

faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal ini adalah variabel makro ekonomi yaitu Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi demi meningkatnya realisasi penerimaan PPN Selain itu perlu menjaring lebih banyak wajib pajak yang dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat memaksimalkan penerimaan PPN.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya Memperhatikan variabel ekonomi makro lainnya yang memiliki peran terhadap penerimaan PPN, seperti Jumlah Pengusaha Kena Pajak agar dapat lebih memaksimalkan atau meminimalisir faktor yang menyebabkan naik atau turunnya penerimaan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, N., & Kunawangsih, T. (2023). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan PPN di Indonesia Periode 2005–2020. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(2), 01-16.

Badan Pusat Statistik (2023) Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Desember 2022 sebesar 5,51 persen
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/02/1949/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-desember-2022-sebesar-5-51-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-kotabaru-sebesar-8-65-persen-.html>

Darmawan, I., Sahri, S., Harsono, I., & Irwan, M. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Ganec Swara*, 17(3), 1054-1067

Informatika, U. B. (2018, Maret). *BAB II LANDASAN TEORI*. Retrieved from Universitas Bina Sarana Informatika: https://repository.bsi.ac.id/repo/files/256014/download/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf

Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 311- 321.

Krisnafani, D. (2022). *Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).

MS Fantrika (2019) *BAB II - e-library UNIKOM*
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2277/8/10_UNIKOM_Rijal%20Abrar_21115143_BAB%20II.pdf

Nasrulloh, N. (2019). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 53(9).
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

PABEAN, L. (2020). Sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan. *Jurnal SIKAP Vol*, 5(1), 91

Pemerintah Kota Surabaya (2022) Pertumbuhan Ekonomi Surabaya Capai 7,17 Persen, Lebih Tinggi dari Jawa Timur dan Nasional
<https://surabaya.go.id/id/berita/70940/pertumbuhan-ekonomi-surabaya-capai-717-persen-lebih-tinggi-dari-jawa-timur-dan-nasional>

R.Vivin Handayani (2019) BAB II KAJIAN PUSTAKA- STIE INDONESIA
<http://repository.stei.ac.id/5904/3/II.pdf>

Rizky Maulianika (2019) Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi KPP Tenggarong)
<https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/41539/rizky%20maulianika%281501035164%29%20fix.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sapridawati, Y., Indrawati, N., Zirman, Z., & Sofyan, A. PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 75-93.

Sinambela, T. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *JURNAL EKUIVALENSI*, 5(1), 83-97.

Wulandari, D. S., & Yulianti, V. (2023). Realisasi Penerimaan PPN yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 19(1), 66-84.

Z. Muhammad (2020) BAB II KAJIAN PUSTAKA
<http://repository.stei.ac.id/1460/3/BAB%202%20%282%29.pdf>

Kusumah, E. P. (2016). Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22. LAB KOM Manajemen FE UBB.

Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara. (2017). Dasar-Dasar Statistik Penelitian. Gramasurya.

Savitri, C., Faddila, S. P., Irmawartini, Iswari, H. R., Anam, C., Syah, S., Mulyani, S. R., Sihombing, P. R., Kismawadi, E. R., Pujiyanto, A., Mulyati, A., Astuti, Y., Adinugroho, W. C., Imanuddin, R., Kristia, Nuraini, A., & Siregar, M. T. (2021). Statistik Multivariat dalam Riset. Widina Bhakti Persada Bandung.

Sihabudin, Wibowo, D., Mulyono, S., Kusuma, J. W., Arofah, I., Ningsi, B. A., Saputra, E., Purwasih, R., & Syaharuddin. (2021). Ekonometrika Dasar Teori dan

Praktik Berbasis SPSS. CV. Pena Persada.

Sugiyanto, E. kusumaningtyas, Subagyo, E., Adinugroho, W. catur, Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews. Academia Publication.

Suyono. (2015). Analisis Regresi untuk Penelitian (1st ed.). Deepublish.

Zahriyah, A., Suprianik, Parmono, A., & Mustofa. (2021). Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS. Mandala Press.

LAMPIRAN

**DATA INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, PENERIMAAN
PPN (THN 2016 – 2022)**

No	Tahun	Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi	Penerimaan PPN
1	2016	0,03	0,11	0,10
2	2017	0,04	0,09	0,13
3	2018	0,03	0,09	0,14
4	2019	0,02	0,08	0,15
5	2020	0,01	-0,04	0,14
6	2021	0,03	0,06	0,16
7	2022	0,07	0,11	0,17

Data Bentuk Desimal, Diolah Penulis, 2023

Sumber Data Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi : BPS Surabaya

Sumber Data Penerimaan PPN : Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I

TABEL UJI t

Pr	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
df	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
1	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,727	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	0,697	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	0,695	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055

TABEL UJI F

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161,448	199,500	215,707	224,583	230,162	233,986	236,768	238,883	240,543	241,882
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	19,353	19,371	19,385	19,396
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845	8,812	8,786
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041	5,999	5,964
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818	4,772	4,735
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147	4,099	4,060
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726	3,677	3,637
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,500	3,438	3,388	3,347
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230	3,179	3,137
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072	3,020	2,978
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948	2,896	2,854
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849	2,796	2,753
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767	2,714	2,671
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699	2,646	2,602
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	2,707	2,641	2,588	2,544

TABEL DW

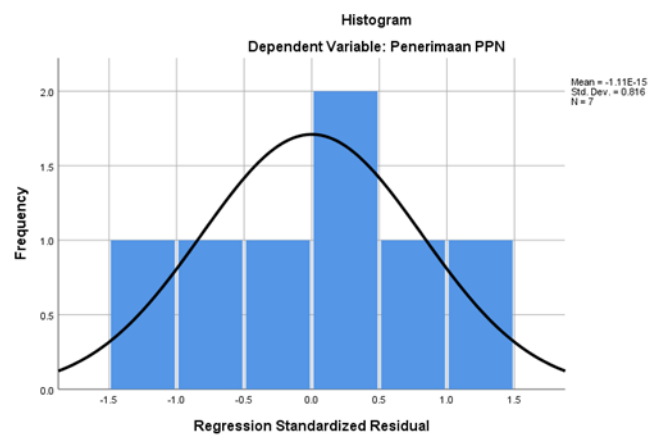
n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0,6102	1,4002								
7	0,6996	1,3564	0,4672	1,8964						
8	0,7629	1,3324	0,5591	1,7771	0,3674	2,2866				
9	0,8243	1,3199	0,6291	1,6993	0,4548	2,1282	0,2957	2,5881		
10	0,8791	1,3197	0,6972	1,6413	0,5253	2,0163	0,3760	2,4137	0,2427	2,8217
11	0,9273	1,3241	0,7580	1,6044	0,5948	1,9280	0,4441	2,2833	0,3155	2,6446
12	0,9708	1,3314	0,8122	1,5794	0,6577	1,8640	0,5120	2,1766	0,3796	2,5061
13	1,0097	1,3404	0,8612	1,5621	0,7147	1,8159	0,5745	2,0943	0,4445	2,3897
14	1,0450	1,3503	0,9054	1,5507	0,7667	1,7788	0,6321	2,0296	0,5052	2,2959
15	1,0770	1,3605	0,9455	1,5432	0,8140	1,7501	0,6852	1,9774	0,5620	2,2198
16	1,1062	1,3709	0,9820	1,5386	0,8572	1,7277	0,7340	1,9351	0,6150	2,1567
17	1,1330	1,3812	1,0154	1,5361	0,8968	1,7101	0,7790	1,9005	0,6641	2,1041
18	1,1576	1,3913	1,0461	1,5353	0,9331	1,6961	0,8204	1,8719	0,7098	2,0600
19	1,1804	1,4012	1,0743	1,5355	0,9666	1,6851	0,8588	1,8482	0,7523	2,0226
20	1,2015	1,4107	1,1004	1,5367	0,9976	1,6763	0,8943	1,8283	0,7918	1,9908

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inflasi	7	.013	.065	.03314	.016787
Pertumbuhan_Ekonomi	7	-.04	.11	.0714	.05210
Penerimaan_PPN	7	.103685	.172604	.14285729	.022535130
Valid N (listwise)	7				

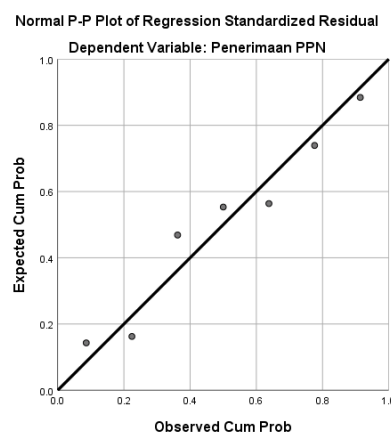
Sumber : Lampiran (Output Descriptive Statistic, Data Diolah dengan SPSS 26) 2023

Gambar 4.1 Histogram Hasil Uji Normalitas



Sumber : SPSS 26, Diolah Penulis, 2023

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas *Normal Probability Plot*



Sumber : SPSS 26, diolah penulis 2023

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00468421
Most Extreme Differences	Absolute	.176
	Positive	.172
	Negative	-.176
Test Statistic		.176
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

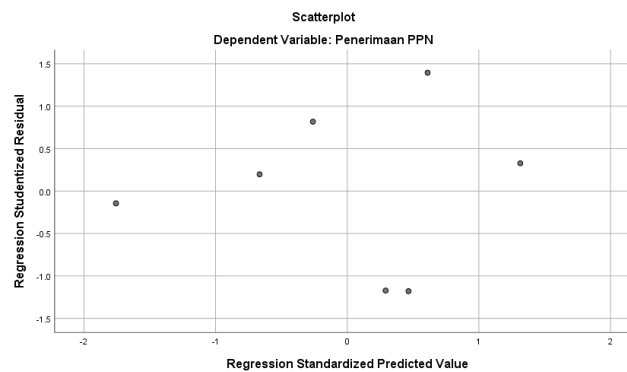
Sumber : SPSS 26, diolah penulis 2023

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Inflasi	.995	1.005
	Pertumbuhan Ekonomi	.995	1.005

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : SPSS 26, Data Diolah Penulis 2023

Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber : SPSS 26, diolah penulis 2023

Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas Metode Spearman Rho

Correlations			Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi	Unstandarize d Residual
Spearman' s rho	Inflasi	Correlation Coefficient	1.000	-.286	-.143
		Sig. (2-tailed)	.	.535	.760
		N	7	7	7
	Pertumbuhan Ekonomi	Correlation Coefficient	-.286	1.000	.143
		Sig. (2-tailed)	.535	.	.760
		N	7	7	7
	Unstandarize d Residual	Correlation Coefficient	-.143	.143	1.000
		Sig. (2-tailed)	.760	.760	.
		N	7	7	7

Sumber : SPSS 26, diolah penulis 2023

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi**Model Summary^b**

Model	Durbin-Watson
1	1.413 ^a

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan
Ekonomi , Inflasi

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber SPSS 26, Data Diolah Penulis 2023

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
Model		B	Std. Error			
1	(Constant)	.126	.005		24.592	.000
	Inflasi	.513	.140	.382	3.670	.021
	Pertumbuhan Ekonomi	11.900	1.337	.927	8.901	.001

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : SPSS 26, diolah penulis 2023

$$\text{Penerimaan PPN} = \alpha + \beta \text{Inflasi} + \beta \text{Pertumbuhan Ekonomi} + e$$

$$\text{Penerimaan PPN} = 0,126 + 0,513 \text{ Inflasi} + 11.900 \text{ Pertumbuhan Ekonomi} + e$$

Tabel 4.10 Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	.126	.005		24.592	.000
	Inflasi	.513	.140	.382	3.670	.021
	Pertumbuhan Ekonomi	11.900	1.337	.927	8.901	.001

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : SPSS 26, Data Diolah Penulis, 2023

Tabel 4.11 Hasil Uji F

Model		ANOVA ^a				Sig.
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	
1	Regression	.003	2	.001	44.289	.002 ^b
	Residual	.000	4	.000		
	Total	.003	6			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi , Inflasi

Sumber : SPSS 26, Data Diolah Penulis, 2023

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.978 ^a	.957	.935	.005736967

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi , Inflasi

Sumber : SPSS 26, Data Diolah Penulis, 2023

Tabel 4.13 Hasil Uji Dominan

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	.126	.005		24.592	.000
	Inflasi	.513	.140	.382	3.670	.021
	Pertumbuhan Ekonomi	11.900	1.337	.927	8.901	.001

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : SPSS 26, Data Diolah Penulis, 2023